



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI PURWANTORO
2. Jabatan : DIREKTUR SUNGAI DAN PANTAI
3. NHK : 452284

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.498.960.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 827 m2/162 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 835.000.000
2. Tanah Seluas 453 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 511 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 183.960.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 499 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.544.600.000**

1. MOBIL, INOVA/TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK/SUPRA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000
3. MOBIL, INOVA/TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000



6. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	230.000.000
7. MOBIL, TOYOTA/INNOVA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	225.000.000
8. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	285.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	121.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	535.318.203
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.700.078.203
III. HUTANG	Rp.	2.002.233.920
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.697.844.283

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.